

Sosialisasi Pemilu Damai dalam Memberikan Pemahaman Sikap Anti Politik Uang dan Anti Golput bagi Pemuda Desa Pomah Kabupaten Klaten

¹Gustina Aruming Sekar Lati, ¹Nur Ahmad Saputro, ²Abdul Jabbar

¹Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Negeri Semarang

²Prodi Ilmu Lingkungan, FMIPA, Universitas Negeri Semarang

Email korespondensi: abduljabbar@mail.unnes.ac.id

Abstract

Pomah Village is one of the villages located in Klaten Regency, Central Java, which is one of the locations held by UNNES GIAT 7. At this time, young voters have an important role in determining their voting rights for the political contestation process. However, not all young people understand and are aware of the importance of political education. Therefore, UNNES GIAT 7 students came up with the idea of a work program in the form of "Peaceful Election Outreach, Anti-Money Politics and Anti-Abstention" to provide an understanding to young voters about the importance of using their voting rights and also anticipate all kinds of actions that deviate from democratic values by avoiding the practice of money politics and abstention. Money politics usually occurs before the election with the mode of regional head candidates or legislative members giving money, basic necessities, rewards and others to the community, so it is consciously considered a corrupt practice. Money politics directly violates the provisions of the UUD 1945 28E paragraph (2). In practice, money politics makes people unable to make choices based on their conscience because they have received rewards from candidates. Therefore, the outreach of peaceful elections can help provide solutions for the community to increase awareness of political participation by implementing rights and obligations and implementing anti-money politics and anti-abstention attitudes in political contestation.

Keyword :

general election, anti-money politic, anti-abstention, young voters

Abstrak

Desa Pomah merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Klaten Jawa Tengah yang menjadi salah satu lokasi diselenggarakan UNNES GIAT 7. Pada saat ini, pemilih muda memiliki peran penting dalam menentukan hak pilihnya untuk proses kontestasi politik. Namun, tidak semua kalangan muda memahami dan sadar akan pentingnya pendidikan politik. Maka dari itu, mahasiswa GIAT 7 UNNES mencetuskan gagasan program kerja berupa "Sosialisasi Pemilu Damai, Anti Politik Uang dan Anti Golput" untuk memberikan pemahaman kepada pemilih muda tentang pentingnya menggunakan hak pilihnya dan juga mengantisipasi segala macam tindakan yang menyimpang dari nilai demokrasi dengan menghindari praktik politik uang dan golput. Politik uang biasanya terjadi menjelang pemilu dengan modus calon kepala daerah atau anggota legislatif memberikan uang, sembako, imbalan dan lain-lain kepada masyarakat, maka secara sadar dianggap merupakan sebuah praktik korupsi. Politik uang secara langsung melanggar ketentuan UUD 1945 pasal 28E ayat (2). Dalam praktiknya, politik uang membuat masyarakat tidak bisa menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani karena telah mendapat imbalan dari kandidat calon. Oleh karena itu, sosialisasi pemilu damai ini dapat membantu memberikan solusi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik dengan cara mengimplementasikan hak dan kewajiban serta menerapkan sikap anti politik uang dan anti golput dalam kontestasi politik.

Kata Kunci :

pemilu, anti politik uang, anti golput, pemilih muda

PENDAHULUAN

Politik elektoral di Indonesia berlangsung setiap lima tahun sekali. Masyarakat memiliki hak untuk memilih siapa saja yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif melalui proses pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi langsung yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara rakyat dan penguasa. Mereka memilih seseorang untuk menjadi wakil atau pemimpin mereka (Yusrin & Salpina, 2023). Pemungutan suara ini merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam rangka menyukseskan serangkaian proses kontestasi politik. Partisipasi politik masyarakat menjadi faktor utama untuk menentukan hasil perolehan suara. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan bagaimana demokrasi yang sehat dan kuat karena masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakatnya.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem politik di Indonesia dapat menciptakan suatu kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Pembangunan dan praktik politik dianggap berhasil ketika partisipasi masyarakat dalam politik dianggap penting bagi kedaulatan mereka. Hal ini menyiratkan bahwa partisipasi yang meningkat merupakan indikasi berjalannya sistem demokrasi yang baik (Syarifudin, 2020). Pemilu pada tahun 2024 secara resmi akan menerapkan sistem pemilihan secara serentak dalam arti sistem ini mengarah kepada penyelenggaraan yang dilakukan bersama dalam satu waktu tertentu. Fenomena tersebut tentunya menjadi momen yang dinantikan bagi masyarakat. Pendidikan politik menjadi salah satu hal yang penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali bagi generasi muda. Perkembangan zaman yang semakin pesat sangat membutuhkan peran pemuda yang besar untuk kepentingan negara dalam mempengaruhi keputusan politik. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga pesta demokrasi lima tahun ke depan, khususnya di kalangan generasi muda. Hasil pemilu 2024 akan bergantung pada partisipasi generasi muda dalam politik (Eldo, 2023). Dalam upaya untuk mengurangi jumlah pelanggaran dalam proses kontestasi politik, pemuda diharapkan menjadi *agent of change* untuk mencapai pemilu yang berintegritas (Raodah et al., 2023). Melek politik menjadi tanggung jawab yang harus disadari bagi semua orang karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga menentukan kedudukan serta kapabilitas negara.

Monografi Desa Pomah tahun 2023 mencatat bahwa sebanyak 2.314 orang berusia diatas 19 tahun dapat menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam kenyataannya, partisipasi pemuda pada saat ini menjadi indikator yang penting karena pemilihan umum dari tahun ke tahun didominasi oleh pemilih muda. Berdasarkan data KPU.co.id, pemilih pemilu tahun 2024 sebanyak 55% merupakan milenial dan Gen-Z. Pada saat ini, kita ketahui bahwa banyak hal yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih muda dalam menentukan hak pilihnya seperti maraknya praktik politik uang dan sikap golput. Pemilu yang demokratis bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan (Raodah et al., 2023). Pemilu yang tidak demokratis dapat terjadi apabila timbul berbagai macam tindakan yang menyimpang atau menggunakan kecurangan (Abdiellah et al., 2022). Sikap golongan putih terjadi diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah mereka merasa bahwa hak pilihnya tidak akan berdampak untuk negara (Dewi et al., 2023). Sehingga, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemuda guna memaksimalkan hak pilihnya dalam pemilu tahun ini.

Pemilu merupakan proses politik yang menjadi sorotan penting bagi masyarakat sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat melalui partisipasi politik. Namun, seringkali kita mengetahui bahwa terdapat fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena politik uang nampaknya bukan hal yang asing terdengar bagi telinga masyarakat.

Fenomena ini bukanlah suatu hal yang baru (Fitriyah, 2012). Politik uang biasanya terjadi ketika mendekati pemilu, dimana modusnya yakni para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Menurut Chandra & Ghafur (2020), tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Calon kepala daerah secara sadar telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya. Praktik korupsi politik melalui politik uang sudah menjadi budaya umum di Indonesia dalam setiap pemilu (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Politik uang secara langsung merupakan suatu tindakan yang merusak tatanan demokrasi dan sistem politik Indonesia. Selain itu, jika hal ini terus menerus berkembang dalam budaya masyarakat, maka dapat menimbulkan adanya pelemahan representasi warga negara. Chandra & Ghafur (2020) menjelaskan bahwa fenomena tersebut membuktikan bahwa uang merupakan unsur pemegang peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan kontestasi politik. Munculnya politik uang dapat menimbulkan stigma buruk masyarakat terhadap calon pemimpin bahwa politik ialah suatu hal yang buruk dan kotor. Dukungan pemilihan dapat mengalami peningkatan apabila terdapat aktivitas pembelian suara. Fenomena tersebut tentunya menjadi salah satu peristiwa yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri (Chandra & Ghafur, 2020).

Politik uang bukanlah satu-satunya fakta nyata yang ada didalam masyarakat. Kita perlu menyadari bahwa masih banyak orang-orang yang memiliki sikap apatis terhadap politik. Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi ini, termasuk rasa tidak suka terhadap tingginya frekuensi penyelenggaraan pemilu, kurangnya kepuasan terhadap kinerja sistem politik, adanya keyakinan (agama) yang anti-demokrasi (Angeline et al., 2015). Penyebab lainnya adalah meningkatnya kasus yang melibatkan partai, minimnya calon potensial di partai politik, dan hilangnya reputasi partai. Sikap tersebut dapat dilihat dengan maraknya aksi golput yang dilakukan karena adanya ketidakpahaman mengenai prosedur pemilu dan kurangnya minat masyarakat terhadap kontestan pemilu.

Universitas Negeri Semarang memiliki sebuah program bentuk kegiatan pembelajaran diluar kampus yang dinamakan UNNES Giat 7. Program ini dilaksanakan di suatu desa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah yang terpilih. Program tersebut diadakan dibawah pengelolaan Pusat Pengembangan KKN Universitas Negeri Semarang. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa UNNES Giat 7 Desa Pomah mengadopsi dari wujud implementasi nilai pengabdian masyarakat yaitu melalui acara "Sosialisasi Pemilu Damai : Anti Politik Uang dan Anti Golput". Sosialisasi tersebut berangkat dari adanya keinginan untuk memberikan pemahaman kepada pemilih pemuda tentang pentingnya menggunakan hak suara dan menyikapi fenomena yang kerap kali terjadi menjelang adanya pemilu karena keputusan mereka akan mempengaruhi iklim politik Indonesia di masa mendatang. Sosialisasi diharapkan dapat memberikan *output* yang baik kepada pemuda Desa Pomah tentang bagaimana mengetahui penjelasan mengenai politik uang dan golput. Sehingga dengan pahamiannya konsep tersebut dapat di implementasikan dalam pemilu karena kedua hal tersebut sudah seharusnya dihindari karena dapat mencederai prinsip negara demokrasi.

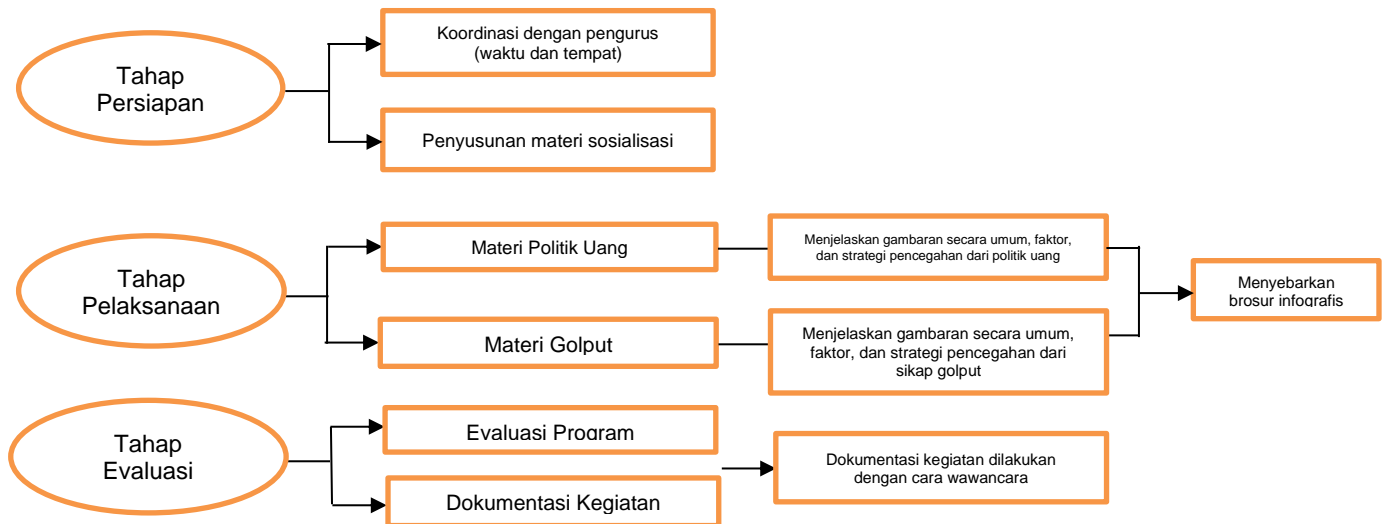
METODE

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan sosialisasi pemilu damai anti politik uang dan anti golput dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Januari 2024 bersama pemuda karang taruna. Lokasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini berlangsung di kediaman salah satu tokoh masyarakat RT 02 Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Prosedur pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Damai Anti Politik Uang dan Anti Golput dilakukan dengan cara menyebarkan brosur infografis secara cetak dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana definisi, faktor dan juga strategi pencegahan dari adanya praktik politik uang dan sikap golput.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan tiga tahapan, antara lain tahap persiapan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dengan

dukungan dari pengurus kecamatan yang telah berkontribusi untuk melakukan koordinasi antara pemuda karang taruna dengan mahasiswa UNNES GIAT 7. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk penyesuaian rencana pelaksanaan dan koordinasi terkait isi materi yang akan disampaikan. Tahapan berikutnya ialah tahapan pelaksanaan dan dilanjutkan dengan tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab kepada pemuda karang taruna terkait dengan hasil dari kegiatan yang sudah berlangsung. Tahapan kegiatan pengabdian dapat dilihat secara singkat melalui Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap persiapan, tim UNNES Giat 7 Desa Pomah melakukan koordinasi dengan Ibu Tri Rahayu selaku pengurus dari Kader Pembangunan Manusia dan juga pemuda karang taruna RT 02 Desa Pomah terkait dengan waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut. Materi yang disampaikan dirasa dibutuhkan oleh pemuda yang mana fenomena politik uang dan golput kerap kali masih terjadi di lingkungan Masyarakat. Pemahaman masyarakat terkait dua peristiwa tersebut dapat dikatakan minim. Tahap berikutnya ialah tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan sosialisasi melalui pemilih muda yang berusia diatas 20 tahun serta dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat. Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi deskripsi dan juga interpretasi. Mahasiswa UNNES Giat 7 memberikan deskripsi secara umum mengenai konsep dan strategi pencegahan dari adanya politik uang dan golput (Gambar 2).



Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi pemilu damai anti politik uang dan anti golput

Selama kegiatan sosialisasi berlangsung, pemateri menekankan mengenai bagaimana pentingnya menyadari sikap anti politik uang dan anti golput dalam kontestasi politik. Selain itu, dijelaskan pula secara teori mengenai definisi, bentuk, faktor dan juga strategi pencegahan dari kedua fenomena tersebut. Sosialisasi tersebut dilaksanakan sembari menyebarkan infografis cetak kepada seluruh peserta yang hadir (Gambar 3).



Gambar 3. Desain brosur infografis cetak

Sosialisasi ini diadakan sebagai langkah awal untuk memperkuat *awareness* kepada pemuda dalam menghadapi fenomena-fenomena menyimpang menjelang bergulirnya pemilihan umum. Kegiatan sosialisasi berakhir dengan mengadakan sesi wawancara dengan pemuda RT 02 yang siap berkontribusi dalam pemilihan umum tahun 2024 (Gambar 4).



Gambar 4. Sesi wawancara dengan pemuda

Wawancara tersebut berisi mengenai pertanyaan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh mahasiswa UNNES GIAT 7. Narasumber mencoba menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuannya dalam memahami isi materi dari sosialisasi yang sudah dilakukan. Wawancara tersebut berhasil mendapatkan konklusi bahwa masih terdapat beberapa narasumber yang belum mengetahui secara general tentang politik uang dan golput. Minimnya pengetahuan politik yang dialami menjadikan praktik politik uang marak terjadi (Nabila, 2020). Faktor ekonomi juga ikut berperan dalam mengubah perspektif masyarakat sehingga politik uang dianggap sebagai kebiasaan yang lumrah terjadi menjelang pemilu. Praktik politik uang berpotensi semakin meningkat karena hal tersebut terus menerus terjadi. Implementasi hak dan kewajiban warga negara menjadi tidak optimal dan maksimal apabila pelanggaran tersebut terus berjalan.

Politik uang secara langsung melanggar ketentuan UUD 1945 pasal 28E ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dalam praktiknya, politik uang membuat masyarakat tidak dapat memilih calon berdasarkan hati nuraninya karena sudah menerima “imbalan” dari calon tersebut. Maka dari itu, sosialisasi ini diadakan dengan harapan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik dengan cara mengimplementasikan hak dan kewajiban. Sosialisasi tersebut dirasa sangat membantu pemuda RT 02 Desa Pomah bahwasannya mereka akan menjadi lebih paham serta dapat membuka wawasan yang luas serta dapat menyikapi dengan baik terkait hal tersebut.

KESIMPULAN

Politik uang dan golput adalah dua hal yang melanggar tatanan sistem politik Indonesia. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, sudah seharusnya masyarakat memiliki kesadaran untuk meleak politik terlebih kepada pemuda Desa Pomah yang merupakan generasi penerus dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi. Mahasiswa UNNES GIAT 7 Desa Pomah mengadakan sosialisasi pemilu damai yang berisi pesan positif untuk berkontribusi dalam pemeliharaan demokrasi dan proses politik. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka pola pikir masyarakat dalam menentukan keputusan politiknya pada saat pemilu di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ibu Tri Rahayu selaku pengurus Kader Pembangunan Manusia, pemuda karang taruna RT 02 Desa Pomah serta perangkat RW dan RT yang telah memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi ini.

REFERENSI

- Abdiellah, M. A., Muharram, D. R., & Julianingsi, J. (2022). The impact of money politic in the local elections in Indonesia. *Journal of Contemporary Local Politics*, 1(1), 1-6. <http://journal.ppishk.org/index.php/jclp/article/view/74>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan hukum dalam mencegah praktik politik uang (money politics) dalam pemilu di Indonesia: Upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52-66. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Dewi, H. L., Mitchell, M., Valentina, S., Lim, V. E., Steven, S., Edyanto, D., ... & Nursalim, I. F. (2023, September). Penguatan kesadaran menyiapkan generasi anti-golput untuk pemilu yang akan datang. *In National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 5, No. 1, pp. 651-655). <http://dx.doi.org/10.37253/nacospro.v5i1.8290>
- Eldo, D. H. A. P., Abdurochman, L., Fahrulrozi, R., & Meilina, M. (2023). Literasi politik di desa: suatu upaya pencegahan politik uang dalam menghadapi pemilu 2024. *COVIT (Community Service of Tambusai)*, 3(2), 79-88. <https://doi.org/10.31004/covit.v3i2.18452>
- Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14. <https://doi.org/10.14710/politika.3.1.2012.5-14>
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di indonesia. *Notarius*, 13(1), 138-153. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29169>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobi, A. A. (2020). Pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141-152. <http://dx.doi.org/10.32697/integritas.v6i1>
- Raodah, P., Nirmala, A. Z., Rahmania, N., Amalia, A. R., & Rahmadani, R. (2023). Optimalisasi peran pemuda sebagai generasi sadar pemilu dalam menekan jumlah

- pelanggaran pemilu. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 1050-1058.
<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v10i2.973>
- Syarifudin, A. (2020). Pilkada Dan fenomena politik uang: Analisa penyebab dan tantangan penanganannya. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 25-34.
<https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.169>
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millennial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646-9653.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>